

Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik

Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.
Karim Suryadi, S.Pd., M.Si.



PENDAHULUAN

Manusia menurut teori klasik yang dihubungkan dengan kiprahnya sebagai makhluk Tuhan merupakan jenis makhluk yang *symbolicism*, memiliki akal, intelek dan hati nurani. Oleh karena itu, manusia pun disebut sebagai *homo education*, *homo economicus*, *homo sapience*, *animal symbolicum*, dan yang lebih populer lagi adalah *zoon politicon*. Dalam konteks pendidikan politik, manusia sebagai *zoon politicon* dan *homo education* adalah relevan dibahas di sini.

Modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: membahas tentang teori dan konsep dalam konteks pendidikan politik. Materi ini, antara lain berisi teori dan tujuan pendidikan politik, bentuk pendidikan politik, dan konsep-konsep pendidikan politik.

Kegiatan Belajar 2: membahas tentang refleksi dan gagasan pendidikan politik dalam isu kontemporer. Materi yang dibahas antara lain peran pendidikan politik dalam isu demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Setelah mempelajari dan mengkaji modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan tentang teori dan tujuan pendidikan politik dengan kata katanya sendiri;
2. menggambarkan kembali situasi dan keberadaan pendidikan politik pada saat sekarang guna dijadikan pelajaran untuk perkembangan pendidikan politik di masa yang akan datang.

Kegiatan Belajar 1

Teori dan Tujuan Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik berbeda sekali dengan istilah pendidikan dan politik dan segi arti dan tujuannya. Untuk itu, ketika akan mengkaji pendidikan politik, tentulah kita harus memahami arti, teori dan tujuan pendidikan politik itu sendiri.

Antara pendidikan dan politik merupakan istilah yang berbeda, namun dalam keseharian kita memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Namun, dalam penerapannya mengalami perdebatan, bahkan pengertian pendidikan politik yang dipahami penguasa berbeda dengan pemahaman rakyatnya sehingga pendidikan politik menjadi alat pembenaran (justifikasi) atas tindakan penguasa.

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN POLITIK

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *political socialization*. Menurut Supriyadi (1999:70) kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Alfian (1981:235) menambahkan bahwa sosialisasi politik dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar. Selanjutnya Alfian (1981: 235) menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Menurut Kartini Kartono (1996:64) pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Sementara Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Kosasih Djahiri (1995:18) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga suatu negara untuk

memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa, negara dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada. Di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (19882:2) dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien.

Al-Khumaisi dalam tesis *magister*-nya mendefinisikan pendidikan politik sebagai upaya formal maupun nonformal yang dicurahkan untuk membantu pada generasi dan pemuda agar bisa berpikir merdeka tentang hukum dan kekuasaan, memberikan penyadaran kepada mereka tentang persoalan-persoalan kontemporer regional, nasional maupun internasional dengan tujuan untuk membentuk dan menumbuhkan pengetahuan, nilai, dan organisasi yang menjamin peningkatan partisipasi politik individu, bingkai falsafah masyarakat, tujuan-tujuan dan kemaslahatannya.

Dalam buku *Political Education* (Patricia) diterangkan bahwa beberapa argumentasi untuk mendukung adanya pendidikan politik pada awal perkembangannya, antara lain dikemukakan oleh berikut ini.

1. Nicolas Haines, dalam bukunya *Person to Person* dia mengajukan pertanyaan "ada berapa orang dalam masyarakat kita yang mengetahui bahwa pendidikan mereka itu dapat membantu membentuk pikiran mereka tentang isu-isu penting yang ada di luar bidang mereka? Berapa banyak orang yang berpendidikan amat yakin akan perannya yang besar dalam kehidupan politik dan sosial?

Dalam pandangan Haines, adanya spesialisasi di pendidikan tinggi membuat orang menjadi kurang kompeten dalam bidang yang ada di luar spesialisasi mereka sehingga apabila mereka bukan spesialisasi politik akan membatasi diri dalam minat kegiatan politik. Akan tetapi, ternyata masyarakat modern sangat bergantung pada kelas menengah berpendidikan yang sedang tumbuh.

Dalam sistem demokrasi setiap orang harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, akan tetapi proses pendidikan tidak mempersiapkan kelas profesional untuk kegiatan partisipasi tersebut.

2. Robert Stradling memberikan bukti bahwa ternyata lulusan persekolahan tidak mengetahui masalah politik.
3. Robert Dunn menyatakan bahwa pendidikan politik di persekolahan memiliki tempat yang sah dalam kurikulum sekolah karena pengetahuan politik merupakan salah satu syarat mutlak menjadikan warga negara yang dewasa.

B. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:57) adalah memberikan sumbangan besar bagi berikut ini.

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya.
2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:68) ialah berikut ini.

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu:
 - a. mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
 - b. berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap;
 - c. aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara;
 - d. sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan, yaitu:
 - a. peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya);
 - b. mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik);
 - c. agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.

M. Nur Khoiron (1999:11) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik, antara lain berikut ini.

1. Mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana mendukung proses dan tujuan perkumpulan-perkumpulan warga di masyarakat sipil.
2. Memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, ekonomi, demokrasi dan konstitusi baik di Indonesia maupun di negara-negara barat.
3. Menyemaiakan komitmen dan keberpihakan yang rasional atau prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental sebagaimana terungkap dalam dokumen-dokumen ini, seperti Deklarasi HAM beserta konvensi yang menyertai UUD 1945, Pancasila dan Sumpah Pemuda yang telah mengikat bersama sebagai sebuah bangsa dan menjadi wahana untuk membangun kinerja.
4. Mempromosikan pengertian tentang peran-peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara dan manusiawi di Indonesia.

Ustman Abdul Mu'iz (2000) mengungkapkan tujuan politik, yaitu membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik.

1. Kepribadian Politik

Kepribadian politik merupakan tujuan pokok proses pendidikan politik. Yang dimaksud kepribadian politik yakni sejumlah respons yang dinamis, sistematis dan berkesinambungan. Beberapa faktor penting yang memberikan kontribusi dalam pengembangan kepribadian politik, yaitu berikut ini.

- a. Sistem politik dilihat dari format dan fungsinya yang memainkan peran penting dalam menentukan orientasi politik pada individu.
- b. Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok.
- c. Kemampuan dan kecakapan khusus.

2. Kesadaran Politik

Menurut Peter (Ustman, 2000) kesadaran politik adalah berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik

individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Sedangkan Al-Khumaisi (Ustman, 2000) mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Apabila kita lihat dari berbagai pendapat di atas maka kita akan mengetahui bahwa kesadaran politik mencakup hal-hal berikut.

- a. Pandangan yang komprehensif.
- b. Wawasan yang kritis.
- c. Rasa tanggung jawab.
- d. Keinginan untuk mengubah, dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial.

C. BENTUK PENDIDIKAN POLITIK

Pendidikan politik tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara konkret di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kuntowijoyo (1994:58) mengemukakan tentang bentuk pendidikan politik, yakni (1) pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi, (2) pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal, seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas.

Pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra, dan bahasa.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan 2 pengertian pendidikan politik dari beberapa ahli? Bagaimana pengertian pendidikan politik menurut pendapat Anda sendiri?
- 2) Siapa sajakah tokoh yang mendukung pendidikan politik pada awal perkembangannya?
- 3) Sebutkan tujuan politik menurut Ustman Abdul Mu'iz!
- 4) Sebutkan beberapa cakupan kesadaran politik!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Menurut Supriyadi (1999:70) kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama maka dapat digunakan secara bergantian. Alfian (1981:235) menambahkan bahwa sosialisasi politik dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar
- 2) Nicolas Haines, Robert Stradling, Robert Dunn.
- 3) Membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik.
- 4) Pandangan yang komprehensif, wawasan yang kritis, rasa tanggung jawab, keinginan untuk mengubah dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial.

**RANGKUMAN**

Untuk memahami pendidikan politik, kita sebaiknya mengetahui teori dan konsep dalam pendidikan politik itu sendiri. Setidaknya untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pengkajian tentang teori dan tujuan pendidikan politik yang banyak dikemukakan oleh para ahli politik.

Mengetahui bentuk pendidikan politik dan konsep-konsep yang terdapat dalam pendidikan politik pun sangat penting.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama maka dapat digunakan secara bergantian. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh....
 - A. Supriyadi
 - B. Alfian
 - C. Kartini Kartono
 - D. Rusadi Kantaprawira
- 2) Salah satu tokoh yang mendukung adanya pendidikan politik, yaitu....
 - A. Plato
 - B. El Robert Dunn

- C. Aristoteles
 - D. Jeremy Bentham
- 3) Tujuan politik yaitu membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik. Pendapat tersebut merupakan pernyataan dari
- A. Afian
 - B. Kartini Kartono
 - C. Ustman Abdul Mu'iz
 - D. Rusadi Kantaprawira
- 4) Konsep pendidikan politik yang benar, antara lain....
- A. Negara, Kekuasaan, teori politik, masyarakat
 - B. Individu, kekuasaan, teori politik, teori sosial
 - C. Negara, kekuasaan, teori politik, teori sosial
 - D. Negara, kekuasaan, wewenang, teori sosial
- 5) Richard C. Snyder mengemukakan bahwa dalam mengambil keputusan ada beberapa tahap, yakni....
- A. 2 tahap
 - B. 3 tahap
 - C. 4 tahap
 - D. 5 tahap
- 6) Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga suatu negara untuk memahami, mencintai, dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa, negara, dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada. Pendapat ini dikemukakan oleh
- A. Nicolas Haines
 - B. Kosasih Djahiri
 - C. Kartini Kartono
 - D. Robert Stradling
- 7) Kuntowijoyo mengatakan tentang bentuk pendidikan politik yaitu pendidikan formal yang diselenggarakan melalui indoktrinasi dan pendidikan politik yang dilakukan secara....
- A. in formal
 - B. nonformal
 - C. formal
 - D. terprogram

- 8) Pendidikan politik yang baik adalah pendidikan yang memobilisasi simbol-simbol....
- nasional
 - sejarah lokal
 - bahasa nasional
 - prasasti sejarah
- 9) Berikut ini beberapa faktor penting yang memberikan kontribusi dalam pengembangan kepribadian politik, *kecuali*....
- sistem politik dilihat dari format dan fungsinya yang memainkan peran penting dalam menentukan orientasi politik para individu
 - berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok
 - kemampuan dan kecakapan khusus
 - kemampuan dalam berpolitik secara praktis
- 10) Kesadaran politik warganegara mencakup hal-hal berikut, *kecuali*....
- pandangan yang komprehensif
 - wawasan yang kritis
 - mengikuti keinginan perkembangan politik
 - rasa tanggung jawab

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Refleksi dan Gagasan Pendidikan Politik dalam Isu Kontemporer

Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana pendidikan politik direfleksikan dalam isu-isu yang sedang berkembang saat ini.

Pendidikan politik yang dilakukan pada saat sekarang harus relevan dengan perkembangan global yang sedang melanda seluruh dunia, setidaknya untuk saat ini isu kontemporer yang harus dimaknai oleh pendidikan politik, antara lain mengenai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup.

A. DEMOKRASI

Ide demokrasi ini erat kaitannya dengan pengembangan *civil society* di Indonesia, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif warga negara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya maka tidak dapat dipungkiri pentingnya pendidikan politik khususnya mengenai pendidikan demokrasi bagi warga negara.

Implikasi dari pandangan tersebut maka diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan tersebut menurut Gandal dan Finn (1999:3) pendidikan yang bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, akan tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan (futuristik). Namun, hal tersebut bukan berarti pendidikan demokrasi sebagai mata pelajaran yang terisolasi, akan tetapi harus dikaitkan dengan pelajaran lainnya.

Berkenaan dengan hal di atas maka menurut Gandal dan Finn (1999:45) perlu dikembangkan model *school-based democracy education*. Model tersebut, antara lain:

1. Perhatian cermat diberikan kepada *the root and branches of the democratic idea*, atau landasan dalam bentuk-bentuk demokrasi;

2. Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi *how the ideas of democracy have been translated into institutions and practices around the world and through the ages* - bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan dunia dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian, siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu;
3. Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam beberapa kurun waktu;
4. Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Ernest Gellner menyatakan (Syaifulallah Syam, 2003:202) bahwa prakondisi yang harus diciptakan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi tersebut. Untuk itu, peran pendidikan demokrasi sangat penting untuk mencapai kondisi ideal kehidupan demokrasi tersebut.

Dalam pandangan Huntington (1982) model demokrasi terbaik meliputi 3 tahap substansial berikut ini.

1. perumusan dan pengembangan identitas nasional.
2. pengembangan pranata atau kelembagaan politik yang efektif.
3. partisipasi politik.

Selain itu juga, menurut Albert Hasibuan (Kompas, 20 Mei 2002) bahwa demokrasi yang hendak kita bangun adalah demokrasi yang mengutamakan pembicaraan dan perundingan, bukan tekanan-tekanan, di mana satu pihak bisa mengajukan pendapatnya serta mendengarkan rasa kekhawatiran satu sama lain.

Sasaran pendidikan demokratis adalah menghasilkan warga negara yang bebas, mau bertanya dan analitis dalam pandangan mereka, tapi memahami ajaran dan praktik demokrasi.

B. HAK ASASI MANUSIA

Berbicara mengenai hak asasi manusia, artinya kita masih juga membicarakan demokrasi. Hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang terpenting dalam demokrasi.

Isu mengenai hak asasi manusia merupakan isu yang selalu berkembang dan menarik untuk dibicarakan. Di sinilah tugas pendidikan politik untuk memahamkan kepada semua warga negara tentang hak asasi manusia, mulai dari sejarah awal munculnya hak asasi manusia sampai perkembangan hak asasi manusia saat sekarang.

Tidak sedikit terjadi perdebatan dan penolakan antara satu warga negara dan warga negara lainnya dalam membicarakan hak asasi manusia, misalnya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dianggap melanggar aturan atau norma-norma tertentu, di sisi lain orang yang melakukan perbuatan tersebut menganggap apa yang dilakukannya merupakan hak asasi yang dimiliki oleh dirinya. Pendidikan politik dalam mengangkat isu hak asasi manusia setidaknya menjelaskan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yang mau tidak mau harus dimiliki dan tidak boleh ada yang menghalanginya, antara lain berikut ini.

1. Kebebasan Berbicara dan Berpendapat

Menurut Patrick Wilson (pencipta serial TV Kanada *The Struggle of Democracy*) bahwa "demokrasi adalah komunikasi orang berbicara satu sama lain tentang masalah bersama mereka dan membentuk suatu nasib bersama. Sebelum rakyat dapat memerintah sendiri, mereka harus bebas menyatakan pendapat mereka.

2. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan maksudnya adalah tak seorang pun diwajibkan mengakui agama tertentu atau kepercayaan lain mana pun yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Banyak negara demokratis telah secara resmi menetapkan agama atau kepercayaan tertentu dengan dukungan negara, namun kenyataannya hal tersebut tidak membebaskan pemerintah dari tanggung jawab untuk melindungi individu yang agama dan kepercayaannya berbeda dengan agama resmi yang didukung pemerintah.

3. Kebebasan berserikat

4. Mendapat perlindungan yang sarna dalam pandangan hukum, termasuk di dalamnya mendapatkan pengadilan yang jujur.

C. LINGKUNGAN HIDUP

Berbicara masalah lingkungan hidup berarti membicarakan alam yang ada di sekitar kita. Sungguh apabila memperhatikan alam sekitar kita sekarang sangat memprihatinkan. Tidak jarang ada pihak-pihak yang hanya menyalahkan pemerintah sang pengambil kebijakan sebagai penyebab kerusakan alam. Namun, apabila kita secara objektif dalam melihat kerusakan alam ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas semua pihak yang ada di sekitar kita termasuk sebagai pendidik. Pendidik bukan hanya yang berkaitan dengan pelajaran biologi, geografi maupun pelajaran lain yang berkaitan dengan alam secara langsung. Pendidikan politik yang diberikan pun akan berperan penting dalam menyoroti permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di sekitar kita.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan model *school-based democracy education*!
- 2) Sebutkan tahapan demokrasi menurut Huntington!
- 3) Jelaskan empat hal mengenai isu tentang HAM yang perlu diangkat oleh pendidikan politik!
- 4) Jelaskan peranan pendidikan politik dalam mengangkat masalah lingkungan hidup!
- 5) Jelaskan peranan pendidikan politik dalam mengungkap ide demokratisasi

Petunjuk jawaban latihan

Pelajari kembali, terutama materi yang menjelaskan tentang refleksi dan gagasan pendidikan politik dalam isu kontemporer.



RANGKUMAN

Ernest Gellner menyatakan (Syaifullah Syam, 2003:202) bahwa prakondisi yang harus diciptakan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi tersebut, untuk itu maka peran pendidikan demokrasi sangat penting untuk mencapai kondisi ideal kehidupan demokrasi tersebut.

Dalam pandangan Huntington (1982) model demokrasi terbaik meliputi 3 tahap substansial perumusan dan pengembangan identitas nasional; pengembangan pranata atau kelembagaan politik yang efektif; dan partisipasi politik. Pendidikan politik dalam mengangkat isu hak asasi manusia setidaknya menjelaskan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yang mau tidak mau harus dimiliki dan tidak boleh ada yang menghalanginya.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Model *school-based democracy education* dikembangkan oleh....
 - A. Gandall dan Finn
 - B. Ernest Gellner
 - C. Ernest dan Finn
 - D. Ernest dan Gandall

- 2) Huntington mengatakan bahwa model demokrasi terbaik meliputi beberapa tahap substansial, berapa tahapankah yang dimaksud?
 - A. 2 tahap.
 - B. 3 tahap.
 - C. 4 tahap.
 - D. 5 tahap.

- 3) Prakondisi yang harus diciptakan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi tersebut, untuk itu maka peran pendidikan demokrasi sangat penting untuk mencapai kondisi ideal kehidupan demokrasi tersebut. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
 - A. Gandall dan Finn
 - B. El Ernest Gelineer

- C. El Ernest dan Finn
 - D. El Ernest dan Gandall
- 4) Demokrasi yang hendak kita bangun adalah demokrasi yang mengutamakan pembicaraan dan perundingan, bukan tekanan-tekanan, di mana satu pihak bisa mengajukan pendapatnya serta mendengarkan rasa kekhawatiran satu sama lain. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
- A. Albert Hasibuan
 - B. Alfian
 - C. Gandal dan Finn
 - D. Ernest Gellner
- 5) Demokrasi adalah komunikasi, yaitu orang berbicara satu sama lain tentang masalah bersama mereka dan membentuk suatu nasib bersama. Sebelum rakyat dapat memerintah sendiri, mereka harus bebas menyatakan pendapat mereka. Pendapat tersebut diungkapkan oleh
- A. Patrick Wilson
 - B. Robert Brown Hill
 - C. Patricia Smart
 - D. Ernest Gellner
- 6) Gandal dan Finn mengatakan bahwa perlunya dikembangkan model school-based democracy education. Salah satu model yang dikembangkan adalah the root and branches of the democratic idea, artinya adalah landasan dalam
- A. sifat-sifat demokrasi
 - B. kegiatan-kegiatan demokrasi
 - C. bentuk-bentuk demokrasi
 - D. aspek-aspek demokrasi
- 7) Berikut ini tahap-tahap substansial model demokrasi menurut pandangan Huntington, *kecuali*....
- A. partisipasi politik
 - B. keinginan pribadi berpolitik
 - C. pengembangan pranata atau kelembagaan politik
 - D. perumusan dan pengembangan identitas nasional
- 8) “Menghasilkan warganegara yang bebas, mau bertanya dan analitis dalam pandangan mereka, tetapi memahami ajaran dan praktik demokrasi”, pandangan ini merupakan sasaran pendidikan....
- A. demokrasi

- B. politik
C. nasional
D. formal
- 9) Pendidikan politik dalam mengangkat isu-isu hak asasi manusia setidaknya menjelaskan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti berikut ini, *kecuali* kebebasan....
- A. berbicara dan berpendapat
B. beragama dan berkeyakinan
C. berserikat
D. dengan tidak mengindahkan aturan
- 10) Jika kita kaji bahwa pendidikan politik berkaitan pula dengan permasalahan lingkungan hidup. Artinya bahwa warga negara diharapkan
- A. berperan serta dalam menangani permasalahan pribadi dalam lingkungan
B. memberikan dukungan terhadap program pemerintah dalam memecahkan masalah lingkungan
C. partisipasi aktif dalam pembangunan yang dicanangkan pemerintah dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan
D. Bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan lingkungan hidup.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) D
- 5) C
- 6) B
- 7) B
- 8) A
- 9) D
- 10) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) A
- 5) A
- 6) C
- 7) B
- 8) A
- 9) D
- 10) A

Glosarium

<i>Political socialization</i>	:	Pendidikan politik
<i>Sense of belonging</i>	:	Rasa memiliki, rasa keterikatan diri
<i>Civil Society</i>	:	Masyarakat madani
Futuristik	:	Pandangan jauh ke depan
<i>The root and branches of the democratic idea</i>	:	Landasan dalam bentuk-bentuk demokrasi
<i>How the ideas of democracy have been translated into institutions and practices around the world and through the ages</i>	:	bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan dunia dalam berbagai kurun waktu

Daftar Pustaka

Alha Pangeran. (1998). *BMP Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Karunika.

Bertens. (1989). *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.